

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Geografi

Kabupaten Wonosobo terletak di Provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak pada 7⁰.43'.13" dan 7⁰.04'.40" garis Lintang Selatan (LS) serta 109⁰.43'.19" dan 110⁰.04'.40" garis Bujur Timur (BT), dengan luas 98.468 ha (984,68 km²) atau 3,03 % luas Jawa Tengah. Jarak ibukota Kabupaten Wonosobo ke ibukota Provinsi Jawa Tengah berjarak 120 km dan dari ibukota negara (Jakarta) berjarak 520 km. Posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara Jalur Pantai Utara dan Jalur Pantai Selatan. Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional tersebut.

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Dilihat dari aspek topografi, Kabupaten Wonosobo bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, daerah dengan ketinggian 250–500 m dpl seluas 33,33% dari seluruh wilayah. Daerah dengan ketinggian 500–1.000 m dpl seluas 50,00% dari seluruh areal dan daerah dengan ketinggian > 1.000 m dpl seluas 16,67% dari seluruh wilayah, sehingga menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wajah Kabupaten. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda menyebabkan tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99 %), hutan negara 18.909,72 ha (19.20 %), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80 %) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01 %). Namun demikian karena topografinya dengan lembah yang masih curam menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor.

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 24 – 30° C di siang hari, turun menjadi 20 ° C pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15 ° C pada malam hari dan 15 – 20 ° C di siang hari. Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 3.400 mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan Watumalang (1.554 mm).

Berdasarkan kajian Tata Ruang Kabupaten Wonosobo sistem perdesaan yang dikembangkan sebagai kawasan Agropolitan adalah Kawasan Rojonoto, yang meliputi Kecamatan Kaliwiro, Sukoharjo, Leksono, dan Selomerto. Pada Kawasan Agropolitan Rojonoto terdapat kota tani utama yaitu Kota Tani Sawangan serta 4 Kota Tani lainnya yaitu Kota Tani Sukoharjo, Kota Tani Tlogo, Kota Tani Selomerto dan Kota Tani Kaliwiro. Sistem Pusat Pelayanan terdiri dari:

- PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang mencakup wilayah Kecamatan Wonosobo
- PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) yang mencakup wilayah Kecamatan Kertek dan Selomerto
- PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang mencakup wilayah Kecamatan Mojotengah, Kejajar dan Sapuran
- PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang mencakup wilayah Kecamatan Kepil, Kaliwiro, Wadaslintang, Leksono, Kalikajar, Garung, Watumalang, Sukoharjo dan Kalibawang.

Berdasarkan pola ruang wilayah dibagi menjadi 2 (dua) besar yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi melindungikelestarian lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Mengingat posisi geografis Kabupaten Wonosobo yang berada di wilayah atas maka Kawasan lindung ini hampir meliputi seluruh wilayah. Kawasan ini terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam; dan
- f. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah.

Sedangkan Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kawasan Budidaya hutan produksi terdapat di Kecamatan Kaliwiro, Leksono, Watumalang, Sukoharjo, Sapuran, Kalibawang, Wadaslintang dan Kepil.

- b. Kawasan Peruntukan Pertanian yang terdiri dari :
 - 1) Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di semua kecamatan kecuali Kecamatan Kejajar;
 - 2) Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan irigasi, bukan hutan lindung atau kemiringan lereng kurang dari 40 % dan terdapat pada semua kecamatan pada lahan yang sesuai.
- c. Kawasan Peruntukan Perkebunan terdapat pada semua wilayah kecamatan sesuai dengan komoditas yang berkembang di kabupaten Wonosobo.
- d. Kawasan Peruntukan Perikanan diprioritaskan dikembangkan disemua kecamatan didaerah yang tersedia pasokan air yang cukup.
- e. Kawasan Peruntukan Peternakan, yang terdiri dari :
 - 1) Kawasan peternakan ternak besar diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Wadaslintang, Kepil, Leksono, Kalikajar, Sapuran, Kaliwiro, Kalibawang, Sukoharjo, Kertek, Selomerto, Watumalang, Wonosobo dan Mojotengah;
 - 2) Kawasan Peternakan unggas di Kecamatan Kejajar, Kalikajar, Garung, Mojotengah, Watumalang, Wadaslintang, Kalibawang, Kaliwiro, Leksono, Sukoharjo, Wonosobo, Kepil, Sapuran, Kertek dan Selomerto.
- f. Kawasan Peruntukan Pertambangan dikembangkan pada kawasan yang potensial bahan tambang namun bukan pada Kawasan Lindung, yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dalam eksploitasinya.
- g. Kawasan Peruntukan Pemukiman sebagaimana dikembangkan di daerah yang datar, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, aksesibilitas baik dan tersedia air bersih.
- h. Kawasan Peruntukan Industri, untuk industri menengah dan besar dikembangkan di sepanjang jalur regional Temanggung-Wonosobo-Banjarnegara yang mencakup wilayah Kertek, Wonosobo dan Selomerto serta Jalur Kertek-Sapuran-Kepil dengan lokasi di Kecamatan Sapuran. Sedangkan sentra-sentra industri kecil dan Industri Rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan.
- i. Kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada kawasan sebagai berikut :
 - 1) Kawasan Wisata Alam;
 - 2) Kawasan Wisata Budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan;
 - 3) Kawasan Wisata Religius terdapat di Kecamatan Kaliwiro, Selomerto dan Kejajar;
 - 4) Kawasan Wisata Buatan terdapat di Kecamatan Kejajar, Wonosobo dan Wadaslintang;
 - 5) Kawasan Wisata Tradisi terdapat di Kecamatan Kejajar, Selomerto, Kertek, Garung, Kalikajar, Wonosobo;
 - 6) Kawasan Wisata sejarah di Kecamatan Wonosobo;
 - 7) Kawasan wisata minat khusus terdapat di Kecamatan Selomerto dan Kejajar.

Sedangkan potensi terjadinya bencana alam, Kabupaten Wonosobo termasuk daerah yang memiliki kelas kerawanan bencana yang tinggi. Dari hasil analisa dan kajian geologi, hidrogeologi, vulkanologi dan kondisi bentang alam wilayah, Kabupaten Wonosobo mempunyai kawasan rawan bencana alam, yaitu :

- a. Kawasan rawan tanah longsor, terdapat di Kecamatan Kepil, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang dan Kecamatan Kalibawang;
- b. Kawasan rawan angin topan, terdapat di Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar dan Kecamatan Watumalang;
- c. Kawasan rawan kebakaran hutan, terdapat di Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil;
- d. Kawasan rawan bencana gas beracun, terdapat di Kecamatan Kejajar; dan
- e. Kawasan rawan bencana letusan gunung api, yang terdapat di Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil.

2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 menurut proyeksi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo sebanyak 777.116 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 393.968 jiwa dan perempuan 383.148 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sebanyak 3.836 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2014 yang sebanyak 773.280 jiwa. Jika jumlah penduduk tersebut dirinci menurut sebaran wilayah, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk dirinci per Wilayah Kecamatan Tahun 2014-2015

No.	Kecamatan	2014			2015		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Wadaslintang	25.718	26.319	52.037	25.770	26.372	52.142
2	Kepil	28.437	28.440	56.877	28495	28.497	56.992
3	Sapuran	28.020	27.453	55.473	28198	27.626	55.824
4	Kalibawang	11.343	11.199	22.542	11.366	11..222	22.588
5	Kaliwiro	22.266	22.255	44.521	22311	22.300	44.611
6	Leksono	20.467	19.842	40.309	20593	19.963	40.556
7	Sukoharjo	16.636	15.694	32.330	16762	15.812	32.574
8	Selomerto	23.483	22.718	46.201	23632	22.862	46.494
9	Kalikajar	29.418	28.765	58.183	29478	28.824	58.302
10	Kertek	39.949	38.489	78.438	40.171	38.703	78.874
11	Wonosobo	43.441	42.701	86.142	43.862	43.115	86.977
12	Watumalang	25.097	24.069	49.166	25.148	24.118	49.266
13	Mojotengah	31.047	28.926	59.973	31.252	29.116	60.368

No.	Kecamatan	2014			2015		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
14	Garung	25.122	23.812	48.934	25.223	23.908	49.131
15	Kejajar	21.573	20.581	42.154	21.707	20.710	42.417
	Jumlah	392.017	381.263	773.280	393.968	383.148	777.116

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2015

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo secara alami dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar.

B. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam Proses pembangunan baik mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pelaksanaan perlu adanya evaluasi pelaksanaan kinerja dari suatu program dan kegiatan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan tersebut. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dapat diketahui informasi capaian kinerja untuk proses penyusunan kebijakan.

Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang mencerminkan realisasi penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi Pemerintah Daerah serta sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah atau penyusunan kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaian yang ada, dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih terfokus, telah ditetapkan beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, dibagi menjadi kategori Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan pada Tabel A.1.

Tabel A.1
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Urusan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab
						2015	2016			
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan									
	1	APM SD		97,95	95	94,23	95,49	95,49	●	Dikpora
	2	APK SD		103,5	103,91	103,92	107,38	107,38	●	Dikpora
	3	APM SMP		90	76	75,71	81,03	81,03	●	Dikpora
	4	APK SMP		100	100,3	100,3	96,31	96,31	▷	Dikpora
	5	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun		90	87	86,4	97,2	97,2	●	Dikpora
	6	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun		99	95,7	95,69	97,23	97,23	●	Dikpora
	7	Angka Putus Sekolah SD		0,04	0,079	0,08	0,18	0,18	▼	Dikpora
	8	Angka Putus Sekolah SMP		0,07	0,25	0,27	0,65	0,65	▼	Dikpora
	9	Rasio APK SMP penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya		0,9	0,6	DTD	0,81	0,81	●	Dikpora
	10	Angka Kelulusan (AL) SD		100	99,25	99,23	100	100	●	Dikpora
	11	Angka Kelulusan (AL) SMP		100	100	100	99,84	99,84	▷	Dikpora
	12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP		100	93,3	93,22	91,97	91,97	▷	Dikpora
	13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK		86,95	75	74,1	70,73	70,73	▷	Dikpora
	14	Persentase ruang kelas SD yang memenuhi standar nasional pendidikan		88%	68%	66%	70%	70%	●	Dikpora

	15	Persentase ruang kelas SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	88%	77%	76%	78%	78%	●	Dikpora
	16	Persentase indeks nilai sikap siswa kategori baik	85%	76%	75%	80%	80%	●	Dikpora
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini								
	1	% PAUD formal yang terakreditasi	80%	11%	10%	20%	20%	●	Dikpora
	2	APK PAUD	49,90	38,34	37,34	39	39	●	Dikpora
3	Program Pendidikan Menengah								
	2	Persentase SMK minimal berakreditasi B	70%	56%	55%	55%	55%	●	Dikpora
4	Program Pendidikan Non Formal								
	1	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	50%	6.80%	6.80%	10	10	●	Dikpora
	2	Angka Melek Huruf Penduduk 15 -45 Tahun	99,99	98,5	98,3	98,9	98,9	●	Dikpora
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
	1	Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	100	75	74,12	87,18	87,18	●	Dikpora
	2	Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	100	94,8	94,07	91,46	91,46	◁	Dikpora
	3	Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	60%	49%	48%	47%	47%	●	Dikpora
6	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan								

	1	persentase SD berakreditasi B	95%	83%	82%	83%	83%	●	Dikpora
	2	Persentase SMP Minimal Berakreditasi B	90%	80%	79%	80%	80%	●	Dikpora
	3	Persentase SMA minimal berakreditasi B	85%	81,00%	80,90%	82,00%	82,00%	●	Dikpora
	4	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	7,5	7,2	7,12	7,18	7,18	▷	Dikpora
	5	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SMP	7	6,4	6,25	6,38	6,38	▷	Dikpora
	6	Rata - rata nilai ujian sekolah SMA	7	6,25	6	6,2	6,2	▷	Dikpora
7	Program Pendidikan Luar Biasa								
	1	Persentase sekolah SD yang menerapkan sistem inklusi	2,60%	0,85%	0,69%	0,85%	0,85%	●	Dikpora
	2	Persentase sekolah SMP yang menerapkan sistem inklusi	5,40%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	●	Dikpora
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan								
	1	Persentase Sekolah yang website memiliki aktif	75	35%	30%	50%	50%	●	Dikpora
	2	Rasio Guru / Murid SD (jumlah guru PNS SD per 1000 murid SD)	35	42,87	42,87	42,87	42,87	●	Dikpora
	3	Rasio Guru / Murid SMP (jumlah guru PNS SMP per 1000 murid SMP)	32	35	35	35	35	●	Dikpora
	4	Rasio Guru/ Murid SMA (jumlah guru PNS SMA per 1000 murid SMA)	32	40	40	40	40	●	Dikpora
	6	Persentase Sekolah Ramah Anak	20	0,003	0,000	1,060	1,060	●	Dikpora
	Program Pendidikan Menengah								
	1	Persentase	70%	56%	55%	60%	60%	●	Dikpora

		kompetensi keahlian SMK minimal berakreditasi B							
	2	Persentase ruang kelas SMA yang memenuhi standar nasional pendidikan	94.5%	87%	86%	88%	88%	●	Dikpora
	3	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	45	43,72	43,66	57,15	57,15	●	Dikpora
	4	Persentase indeks nilai sikap siswa SMA kategori baik	85%	75%	75%	76%	76%	●	Dikpora
	5	Rasio APK SMA penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	0,7	0,6%	DTD	0,6%	0,6%	●	Dikpora

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ◁ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pendidikan, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 42 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 32 indikator berstatus telah tercapai, 8 target indikator akan tercapai dan 2 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target yaitu angka putus sekolah SD dan SMP. Angka putus sekolah tersebut berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, sehingga target pada indikator angka putus sekolah SD dan SMP akan tercapai apabila terdapat sinergitas program penanggulangan kemiskinan dengan pendidikan.

2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 672 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel A.2.

Tabel A.2
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							
	1 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	95	89,64	89,64	90,27	90,27	●	Dinas Kesehatan
	2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	123,10	100	100	●	Dinas Kesehatan
	3 Cakupan Persalinan yang ditolong oleh nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan (%)	100	99,70	99,70	99,36	99,36	◁	Dinas Kesehatan
	4 Cakupan kunjungan nifas lengkap (KFL) (%)	100	97,80	97,80	99,46	99,46	●	Dinas Kesehatan
	6 Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	80	58,76	58,76	58,76	58,76	●	Dinas Kesehatan
	7 Prosentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan surveilans jamaah haji (%)	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita							
	1 Cakupan Kesehatan Bayi (Kunjungan Bayi) (%)	100	99,35	99,20	100,00	100,00	●	Dinas Kesehatan
	2 Angka kelangsungan hidup bayi(%)	99,25	99,03	99,03	98,80	98,80	◁	Dinas Kesehatan
	3 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (%)	100	100	100	65	65	▼	Dinas Kesehatan
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan							
	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)	100	90	90	100	100	●	Dinas Kesehatan
	2 Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas (%)	75	45	42	45	45	●	Dinas Kesehatan

	3	Rasio kebutuhan : ketersediaan obat	1:1	1:06	1:06	"1 : 0,08	"1 : 0,08		Dinas Kesehatan
	4	Persentase pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	67	41,60	41,60	41,67	41,67		Dinas Kesehatan
	5	Persentase apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan yang memiliki izin. (%)	100	90,0	90,0	100,0	100,0		Dinas Kesehatan
4		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya							
	1	Ratio bed rawat inap per satuan penduduk	1: 5000	1: 6507	1: 6507	1 : 6.507	1 : 6.507		Dinas Kesehatan
	2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:10.000	1:10.073	1:10.073	1 : 10.073	1 : 10.073		Dinas Kesehatan
	3	Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	100	41,6	41,6	33,33	33,33		Dinas Kesehatan
5		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit							
	1	Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan (%)	90	68,30	68,30	100	100		Dinas Kesehatan
	2	Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap (%)	90	83,50	83,50	79,78	79,78		Dinas Kesehatan
	3	Angka Kematian BBLR (1.500gr - 2.500 gr) di Rumah Sakit (%)	2,50	4,50	4,50	7,06	7,06		Dinas Kesehatan
	4	Ketersediaan Obat di Rumah Sakit (%)	99	98	98	97	97		Dinas Kesehatan
	5	Lama Tunggu Pelayanan Rawat Jalan	60 menit	75 menit	75 menit	57	57		Dinas Kesehatan
	6	Lama Tunggu Pelayanan Obat	15 menit	29 menit	29 menit	122	122		Dinas Kesehatan
6		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah							

	sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata							
1	Bed Occupancy Ratio/ Tingkat pemakaian bed pasien di RS (%)	75	61,1	61,14	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan dan RSUD
2	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Gedung Ruang Pelayanan (%)	90	80	80	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan dan RSUD
3	Baku Mutu Limbah Cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	80 gr/lt	91,1 gr/lt	91,1 gr/lt	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan dan RSUD
7	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan							
1	Jumlah Puskesmas Yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	15	4	4	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan dan RSUD
2	Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	2: 10.000	1,6: 10.000	1,6: 10.000	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan dan RSUD
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
1	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan oleh Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) di Kab/Kota	100	100	100	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan dan RSUD
2	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	100	33	16	33	33	●	Dinas Kesehatan
3	Prosentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) (%)	100	100	100	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan dan RSUD
4	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin Operasional(%)	100	96,30	96,30	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin							
1	Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin(%)	95	88,40	88,40	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan dan RSUD
1	Program Pencegahan dan							

0	Penanggulangan Penyakit Menular								
	1	Penanganan penderita TB sesuai standar	100	100	DTD	100	100	●	Dinas Kesehatan
	2	Prevalensi HIV (persen) (%)	< 0,	0,04	0.038	0,04	0,04	●	Dinas Kesehatan
	3	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita(%)	30	23,30	23,30	23,47	23,47	●	Dinas Kesehatan
	4	Prsentase kasus DBD ditangani(%)	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
	5	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	< 25	4,4	4,4	22,44	22,44	▼	Dinas Kesehatan
	6	Persentase penemuan penderita diare(%)	50	46,70	46,70	78,80	78,80	▼	Dinas Kesehatan
	7	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap(%)	98,50	98,30	98,30	101,70	101,70	●	Dinas Kesehatan
	8	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100	100	99,24	99,24	▶	Dinas Kesehatan
	9	Penemuan kasus AFP Non polio per 100.000 penduduk usia < 15 tahun	≥ 2	≥ 2	2	2,3	2,3	●	Dinas Kesehatan
	10	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam (%)	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
	11	Angka kesakitan malaria (API/1000 penduduk)	< 0,7	0,02	0,02	0,02	0,02	●	Dinas Kesehatan
	12	Persentase penanganan penderita malaria (%)	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
	13	Persentase kasus filariasis yang mendapat pengobatan	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
	14	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat (%)	95	82	82	100	100		Dinas Kesehatan
11	Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular							●	
	1	Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	< 23,4	1,19	1,19	0,74	0,74	●	Dinas Kesehatan

	2	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara(%)	4	1,50	1,50	0,90	0,90	▼	Dinas Kesehatan
	3	Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun (%)	< 15,4	20	20	0,13	0,13	●	Dinas Kesehatan
	4	Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun (%)	< 5,9	< 5,9	NA	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan
	5	Presentase penderita gangguan jiwa bebas pasung (%)	98	95	95	95	95	●	Dinas Kesehatan
1 2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
	1	Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK) (%)	10	11,80	11,91	9,25	9,25	●	Dinas Kesehatan
	2	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan(%)	75	20	7	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan
	3	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif(%)	67,50	62,2	62,29	68,93	68,93	●	Dinas Kesehatan
	4	Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (%)	3,50	4,71	4,71	5,10	5,10	▶	Dinas Kesehatan
	5	Persentase anak balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan(%)	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
	6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2 tahun)(%)	15	16,85	16,85	11,14	11,14	●	Dinas Kesehatan
	7	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI balita usia 6-24 tahun dari keluarga miskin(%)	100	100	100	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan
	8	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (persen)	1,1	2,2	2,2	2,56	2,56	●	Dinas Kesehatan
	9	Persentase Balita /Gizi Kurang dari keluarga miskin yang tertangani(%)	100	85	80	100	100	●	Dinas Kesehatan

	10	Persentase Balita Gizi buruk dari keluarga miskin yang tertangani(%)	100	85	80	100	100	●	Dinas Kesehatan
13		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat							
	1	Cakupan desa siaga aktif strata mandiri(%)	13,20	5	5	6,70	6,70	●	Dinas Kesehatan
	2	Cakupan rumah tangga sehat (%)	80	71	71	74	74	●	Dinas Kesehatan
	3	Prosentase posyandu dengan strata mandiri(%)	30	20	20	20,60	20,60	●	Dinas Kesehatan
14		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan							
	1	Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat(%)	80	45	42	54,80	54,80	●	Dinas Kesehatan
	2	Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT) (%)	90	82,50	82,50	79,06	79,06	▶	Dinas Kesehatan
15		Program Pengembangan Lingkungan Sehat							OPD Bidang Urusan kesehatan
	1	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	6	1	1	1	1	●	Dinas Kesehatan
	2	Persentase Desa ODF(%)	38	6,00	5,90	6,03	6,03	●	Dinas Kesehatan
	3	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan(%)	90	70,11	70,11	75,90	75,90	●	Dinas Kesehatan
	4	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan(%)	70	48	45	51,69	51,69	●	Dinas Kesehatan
	5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah lingkungan(%)	100	45	10	39,28	39,28	▼	Dinas Kesehatan

	6	Persentase ruta miskin berakses sanitasi layak(%)	80	4	33,57	DTD	DTD	▼	Dinas Kesehatan
1	6	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia							Dinas Kesehatan
	1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia(%)	100	99,70	99,70	69,98	69,98	▼	Dinas Kesehatan

Keterangan :



: Telah Tercapai ;



: Akan Tercapai;



: Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dari 72 indikator sasaran pada urusan kesehatan terdapat 45 indikator telah mencapai target, 8 indikator akan tercapai dan 19 indikator yang memerlukan perhatian khusus. Guna mencapai indikator RPJMD pada tahun 2021, maka diperlukan upaya keras dari pemerintah Kabupaten Wonosobo. Salah satu indikator yang memerlukan perhatian adalah cakupan kesehatan masyarakat miskin. Pencapaian target pada indikator ini akan menyumbang pada program penanggulangan kemiskinan yang selama ini menjadi isu utama pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 39 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel A.3.

Tabel A.3
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
						Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program pembangunan jalan dan jembatan									
	1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	65	50,16	54	45	45			Dinas PU dan Penataan Ruang
	2	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (%)	70	60,51	9,56	45	45			Dinas PU dan Penataan Ruang
	3	Persentase jumlah jembatan kondisi baik (%)	85	65,898	73.50	DTD	DTD			Dinas PU dan Penataan Ruang
	4	Persentase KSCT yang terbangun jalan lingk	60	10	10	DTD	DTD			Dinas PU dan Penataan Ruang

2	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan								
	5	Tingkat kemantapan jalan (%)	75	60	60	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	6	Persentase Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin per tahun (%)	25	5	5	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	7	Persentase jembatan kondisi rusak yang direhabilitasi per tahun (%)	22%	16	16%	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
3	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan								
	8	Rasio ruas jalan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin	0,75	0,625	0,6	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	9	Rasio jembatan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin	1	DTD	1	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	10	Persentase panjang jalan yang dileger (%)	60%	1	10%	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
4	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan								
	11	Rasio Panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	1	0,833	0,8	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	12	Rasio Jumlah jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	1	1	1	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
5	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong								
	13	Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang	0,8	0,608	0,57	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	14	Rasio drainase lingkungan permukiman kondisi baik dan sedang	0,5	0,415	0,4	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	15	Persentase jalan lingkungan permukiman perkotaan yang dilengkapi saluran drainase	100%	76,667	72%	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	16	Persentase penurunan Jumlah titik genangan (luapan limpasan	30%	12	30%	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang

		saluran) pada jalan utama perkotaan							
	17	Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik	80%	60,833	57%	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya								
	18	Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	0,8	0,721	0,705	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	19	Rasio jaringan irigasi	0,1	0,076	0,071 ₄	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	20	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten	70%	67,725	67,27%	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Persentase jaringan Irigasi Kabupaten Baik	75%	70,892	70,07	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku								
	21	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal	90%	83,333	82%	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
8	Program pembangunan infrastruktur perdesaan								
	22	Persentase panjang jalan antar desa status kabupaten dalam kondisi baik	100	85,340	85,34	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								
	23	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak	100%	87,783	85,34%	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	24	Persentase satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL komunal	3,75%	2,250	1,95%	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	25	persentase desa yang memiliki BPSPAM (%)	0,56	51,667	42	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	26	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	40	7,883	1,46	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang

	27	Persentase penduduk berakses sanitasi (%)	100	57	48,40	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
10	Program Lingkungan Sehat Perumahan								
	28	Persentase KK ber akses sanitasi layak (%)	68	28,84	21,01	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	29	Persentase Kawasan Kumuh perkotaan (%)	0	0,597	0,795	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
	30	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	10	7,50	7	DTD	DTD	▼	Dinas PU dan Penataan Ruang
11	Program Perencanaan Tata Ruang								
	31	Persentase Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	100	73,96	68,75	73,96	73,96	▼	Bappeda
	32	Persentase RDTR yang dilegalisasi (%)	53%	0	0	0	0	▼	Bappeda
12	Program Pemanfaatan Ruang								
	33	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	90	78	76	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	34	Persentase peta RDTR yang direkomendasi BIG (%)	100	DTD	0	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
12	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)								
	35	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah (ber-HPL/HGB)	0,54	0,127	0,044	DTD	DTD	▼	Dinas Lingkungan Hidup
	36	Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan (%)	40	38,98	38,78	38,80	38,80	●	Dinas Lingkungan Hidup
	37	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar	100	73	70	75	75	●	Dinas Lingkungan Hidup

		20% dari luas wilayah perkotaan							
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
	38	Rasio Bangunan/ Rumah yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang	20	29	30	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	39	Persentase jumlah Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	60%	5	2,66	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Keterangan :

● Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dari 39 indikator target RPJMD hingga tahun 2016 terdapat 2 indikator yang telah tercapai, 2 indikator yang akan tercapai dan 35 indikator yang memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Hingga saat ini masih dilakukan survei lapangan sebagai pengukuran indikator-indikator sehingga data ketercapaian belum dapat disajikan.

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel A.5.

Tabel A.5
Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program Pengembangan Perumahan							
	1 Rasio Rumah Layak huni	0,914	0,890	0,885	0,750	0,750	▷	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	2 Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni	29415	33666	34416	37608	37608	●	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

									dan Perhubungan
2		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan							
	3	Cakupan rumah layak huni terjangkau	10%	4%	3,57%	3,81%	3,81%	▷	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
3		Program pengelolaan areal pemakaman							
	4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1000	865	865	1358	1358	●	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
4		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial							
	5	persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana	100%	1%	40%	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Keterangan :



: Telah Tercapai ;



: Akan Tercapai;



: Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan **Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**, dari sebanyak 5 target indikator diketahui bahwa 2 target indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator yang memerlukan upaya keras untuk mencapai yaitu persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana. Guna mencapai target tersebut, maka selain diperlukan usaha keras, sinergi dengan OPD lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) perlu dilakukan agar memperoleh basis data rumah yang rusak akibat bencana.

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel A.6.

Tabel A.6
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program Penyuluhan dan pendidikan politik masyarakat							
1	Tingkat partisipasi pemilih (%)	75	75,38	73,9	DTD	DTD	▼	Kantor Kesbanglinmas
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan							
2	Prosentase kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dan difasilitasi penyelesaiannya (%)	100	100	DTD	100	100	●	Satpol PP
3	Persentase siskamling aktif (%)	75	50	45	55	55	●	Satpol PP
4	Prosentase FKDM yang aktif (%)	85	65	57	65	65	●	Satpol PP
3	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan							
5	Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah (%)	85	68	65	70	70	●	Kantor Kesbanglinmas
4	Program pengembangan wawasan kebangsaan							
6	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk)x1000	4,45	4,42	4,42	4,42	4,42	●	Kantor Kesbanglinmas
5	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal							
7	Persentase patroli siaga ketertiban	90	75	75	75	75	●	Satpol PP

Ururan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
						Tahun 2015	Tahun 2016			
		umum dan ketentraman masyarakat								
	8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota		100	85	40	85	85	●	Satpol PP
	9	Angka kriminalitas yang tertangani		85	70	70	70	70	●	Satpol PP
6	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)									
	10	Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk		0,005	0,025	0,025	0,025	0,025	●	Satpol PP
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
	11	Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		0,4	0,25	0,2	0,25	0,25	●	Satpol PP
	12	Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota		1,50	1,25	1,15	1,23	1,23	▶	Satpol PP
	13	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		0,74	0,64	0,64	0,64	0,64	●	Satpol PP
	14	Persentase LINMAS terlatih (%)		40	9	8	9	9	●	Satpol PP
	15	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		7,04	4,74	4,74	4,74	4,74	●	Satpol PP
8	Program pencegahan dini dan penanggulangan									

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
	korban bencana alam							
16	Persentase desa siaga bencana (%)	75	28	25	25	25	▷	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Persentase sekolah tanggap bencana (%)	100	78	75	DTD	DTD	▼	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, dari sebanyak 17 target indikator diketahui bahwa 13 target indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator berstatus akan tercapai dan 2 target indikator perlu upaya keras.

6. Penyelenggaraan Urusan Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel A.6.

Tabel A.6
Capaian Kinerja Urusan Sosial

Urusan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJM D 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggung jawab
					2015	2016				
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									
	1	Persentase PMKS yang terlayani jaminan sosial(%)	DTD	88,40	88,40	90,00	90,00	●	Dinsosperm asdes	
	2	Persentase PMKS yang mendapatkan bansos(%)	DTD	42,20	42,20	26,00	26,00	▼	Dinsosperm asdes	
	3	Persentase panti yang menyediakan sarpras kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar(%)	DTD	33,30	33,30	DTD	DTD	▼	Dinsosperm asdes	
	4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental	DTD	NA	NA	DTD	DTD	▼	Dinsosperm asdes	

		serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial							
	5	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui KUBE atau kelompok sosil ekonomi sejenis lainnya(%)	DTD	32	32	8,00	8,00	▼	Dinsosperm asdes
2	Program Pembinaan Anak Terlantar								
	1	Persentase anak terlantar, balita terlantar, ABH, anak dengan kecacatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	DTD	46,40	46,40	71,20	71,20	●	Dinsosperm asdes
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma								
	1	Persentase penyandang cacat dan trauma yang kebutuhan dasarnya terpenuhi(%)	DTD	56	56	DTD	DTD	▼	Dinsosperm asdes
4	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo								
	1	Jumlah panti sosial	DTD	17	17	17	17	●	Dinsosperm asdes
	2	Persentase panti sosial berbadan hukum(%)	DTD	60	60	94,10	94,10	●	Dinsosperm asdes
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
	1	Persentase lembaga sosial yang berbadan hukum(%)	DTD	40	40	45	45	●	Dinsosperm asdes
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								

1	Persentase kenaikan zakat di lembaga ZIS(%)	19	DTD	DTD	DTD	DTD	▼	Dinsosperm asdes
2	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar(%)	60	42,84	42,84	26,00	26,00	▼	Dinsosperm asdes
3	Cakupan Raskin terhadap Rumah Tangga Miskin(%)	79,42	61,60	61,60	61,60	61,60	▷	Dinsosperm asdes
8	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)							
4	Persentase rata-rata kenaikan PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi(%)	2,50	2	DTD	11,50	11,50	●	Dinsosperm asdes

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan sosial, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 14 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai, 1 target indikator akan tercapai dan 7 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Tujuh indikator yang menjadi perhatian khusus tersebut berkaitan dengan jumlah penerima bantuan sosial dan jaminan sosial yang belum mencapai target. Hal ini dikarenakan dengan kondisi sebagian besar penduduk Kabupaten Wonosobo berada di bawah garis kemiskinan, sumber pembiayaan bantuan sosial dari APBD tidak mencukupi. Oleh karenanya, kerjasama dengan sektor swasta diperlukan guna mencapai target RPJMD tersebut.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.1

Tabel B.1
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Urusan dan Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi i Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggung jawab
					2015	2016			
1	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja								
	1	Persentase kenaikan kepersertaan pekerja dalam jaminan kesehatan(%)	DTD	30	30	10,08	10,08	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	2	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun yang diselesaikan(%)	DTD	100	100	100,00	100,00	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	3	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja non diskriminatif(%)	DTD	70	70	75,00	75,00	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	4	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun,	DTD	4	4	2	2	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
2	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja								
	1	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi(%)	60	47	47	43,19	43,19	▷	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	2	Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat(%)	75	67	66	44,40	44,40	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	3	Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi(%)	15	1	0	0,00	0,00	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	4	Persentase warga miskin yang	25	10	10	12,00	12,00	●	Dinas Tenaga Kerja,

		mendapatkan pelatihan ketrampilan(%)							Perindustrian, dan Transmigrasi
	5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi(%)	10	0	0	18,73	18,73	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	6	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional(%)	20	0	0	0,00	0,00	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	7	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan(%)	55	45,43	45,43	62,61	62,61	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	8	Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan(%)	30	10	10	19,04	19,04	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	9	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan(%)	30	10	10	12,00	12,00	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif								
	1	Persentase Rata miskin yg mampu menjadi wira usaha(%)	20	DTD	DTD	0,00	0,00	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ◁ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan tenaga kerja, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 14 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, 1 target indikator akan tercapai dan 5 indikator memerlukan perhatian untuk mencapai target. Agar target RPJMD tercapai pada tahun 2021, maka memerlukan upaya keras berupa perencanaan yang terstruktur antara lain berupa pembinaan terhadap angkatan kerja dan lembaga pelatihan khusus agar memperoleh sertifikat nasional.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.2.

Tabel B.2
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan dan Program Pembinaan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan							
1	Persentase anggaran responsif gender(%)	15	0,13	0,13	0,13	0,13	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2	Persentase APBDes Responsif gender dan PUHA(%)	20	10	10	12,81	12,81	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
3	Persentase anak berhadapan dengan hukum yang tertangani(%)	100	100	100	100	100	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak							
1	Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani(%)	100	100	100	100	100	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2	Persentase pengaduan	100	100	100	100	100	●	Dinas Pengendalian

		korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani(%)							an Penduduk, KB, PP dan PA
	3	Jumlah lembaga layanan aktif tingkat desa	75	5	5	6	6	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	4	Persentase Lembaga penyedia layanan PP dan PA(%)	100	30	30	6	6	▼	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	3	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan							
	1	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional(%)	40,00	38,21	38,21	38,21	38,21	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	2	Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen(%)	8,44	4,44	4,44	4,44	4,44	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan(%)	50	42,71	42,71	50,12	50,12	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan(%)	70	63,81	63,81	2,42	2,42	▼	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan							

	Perlindungan Perempuan dan Anak							
1	Rasio KDRT perempuan (kasus yang dilaporkan dan tertangani)	5	4,11	4,11	4,11	4,11	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2	persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah umur(%)	15	20	20	NA	NA	▼	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
3	Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas(%)	100	96,49	96,49	4,03	4,03	▼	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
4	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (kasus yang dilaporkan dan tertangani)(%)	3,5	2,7	2,7	2,70	2,70	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
5	Persentase desa ramah anak(%)	10	1,50	1,50	1,51	1,51	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
6	Persentase puskesmas ramah anak(%)	40	18	18	62,50	62,50	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 17 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 13 indikator berstatus telah tercapai, sedangkan 4 indikator lain masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Indikator-indikator yang memerlukan perhatian khusus tersebut antara lain persentase lembaga penyedia layanan PP dan PA, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur dan angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan

masih jauh dari target, yakni sebesar 2,42% dengan target pada tahun 2016 sebesar 63,81%. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di Kabupaten Wonosobo. Pengaruh budaya tersebut juga berdampak pada rendahnya angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas yang bernilai 4,03% pada tahun 2016 dengan target sebesar 96,49% pada tahun yang sama. Budaya patriarki bersama tingginya angka kemiskinan juga menuntut subordinasi perempuan dalam sektor pendidikan yang belum menjadi prioritas utama bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

3. Penyelenggaraan Urusan Pangan

Kinerja pada urusan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.3.

Tabel B.3
Capaian Kinerja Urusan Pangan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir Rpjmd	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							
1	Skor PPH	DTD	86,6	86,6	88,8	88,8	●	
2	Rata-rata konsumsi pangan per kapita	2232	2228	2226	2114,8	2114,8	▶	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Rata-rata konsumsi protein nabati	76	70	69,53	40,1	40,1	▼	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Rata-rata konsumsi protein hewani	50	40	39,8	22,6	22,6	▼	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Jumlah lumbung pangan	33	20	17	31	31	●	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
6	Jumlah desa mandiri pangan	45	29	26	29	29	●	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

2	Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan							
1	Persentase ketersediaan bahan pangan utama terhadap kebutuhan (%)	100	95	94	216,298	216,298	●	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Persentase pengeluaran konsumsi padi-padian terhadap total pengeluaran konsumsi makanan	14	13,21	13,19	20,1	20,1	●	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan							
1	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada industri pangan lokal	91%	78%	70%	73,00%	73,00%	△	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Keterangan :



Telah Tercapai ;



Akan Tercapai;



Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pangan, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 9 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator akan tercapai dan 2 indikator memerlukan perhatian dan upaya keras untuk mencapai target yaitu rata-rata konsumsi protein nabati, rata-rata konsumsi protein hewani.

4. Urusan Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan urusan **Pertanahan** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.4

Tabel B.4
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							
1	Persentase Luas lahan	75	81,75	43,91	47,30	47,30	▼	Dinas Perumahan,

		bersertifikat/Persentase lahan tanah aset daerah yang disertifikatkan							Kawasan Permukiman dan Perhubungan
2		Persentase lahan tanah aset desa yang disertifikat	30	5	0	0,001	0,001	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
2	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan								
3		Persentase Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	tidak ada kasus	100	100	●	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
4		Persentase Penyelesaian ijin lokasi (%)	100	100	100	100	100	●	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan **Pertanahan** sampai tahun 2016 dari sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 2 target indikator akan tercapai.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 32 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.5.

Tabel B.5
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya							
1	Persentase panjang sempadan sungai utama berupa ruang terbuka hijau	88%	88%	88%	DTD	DTD	▼	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian							

Urusan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
						Tahun 2015	Tahun 2016			
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
	2	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	100	73,33	68	68	68		Dinas Lingkungan Hidup	
	3	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara (%)	100	80	76	78	78		Dinas Lingkungan Hidup	
	4	Persentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	29	14,87	DTD	DTD		Dinas Lingkungan Hidup	
	5	Persentase Kualitas sumber mata air Kelas A (%)	100	79	75	75	75		Dinas Lingkungan Hidup	
	6	Indeks Kualitas udara	80	70	DTD	77,72	77,72		Dinas Lingkungan Hidup	
	7	Indeks kualitas air sungai	70	62	60	65	65		Dinas Lingkungan Hidup	
	8	Indeks tutupan vegetasi	91,28	91,28	91,28	41,65	41,65		Dinas Lingkungan Hidup	
	9	Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi (%)	90	15	0	12	12		Dinas Lingkungan Hidup	
	10	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan	100	100	100	100	100		Dinas Lingkungan Hidup	

Urusan dan Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
					Tahun 2015	Tahun 2016			
		pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)							
	11	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100	100	100	100	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam								
	12	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	50	29	25	4,83	4,83	▼	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
	13	Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS (%)	80	22	10	10	10	▼	Dinas Lingkungan Hidup
	14	Persentase ibukota kecamatan yang terpasang informasi status kualitas udara dan air (%)	67		0	0	0	▼	Dinas Lingkungan Hidup
	15	Persentase peningkatan kunjungan portal lingkungan Kab. Wonosobo (%)	70	0	0	0	0	●	Dinas Lingkungan Hidup
	16	Rasio motivator lingkungan thd 10000 penduduk	75	38	30	3,3	3,3	▼	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program peningkatan pengendalian polusi								
	17	Indeks kualitas air sungai	60	30	25	65	65	●	Dinas Lingkungan Hidup
	18	Persentase kendaraan roda	60	5	DTD	DTD	DTD	▼	Dinas Lingkungan

Ururan dan Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
					Tahun 2015	Tahun 2016			
		empat yang lolos uji emisi (%)							Hidup
	19	Persentase usaha yang memiliki IPAL thd industri wajib IPAL (%)	50	35	35	27,81	27,81	▶	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								
	20	Persentase luas lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung diluar hutan (%)	27,80	35,967	37,86	38,00	38,00	●	Dinas Lingkungan Hidup
	21	Persentase sumber mata air yang rusak (%)	10	5	DTD	6,25	6,25	●	Dinas Lingkungan Hidup
	22	Persentase tutupan vegetasi (%)	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	●	Dinas Lingkungan Hidup
	23	Rata-rata indeks seluruh jasa ekosistem D3TLH	0,51	0,45	0,44	DTD	DTD	▼	Dinas Lingkungan Hidup
	24	Persentase peningkatan jumlah spesies flora fauna terancam yang terselamatkan (%)	10%	DTD	DTD	DTD	DTD	▼	Dinas Lingkungan Hidup
	25	Indeks keanekaragaman hayati	1	DTD	0	DTD	DTD	▼	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
	26	Persentase penanganan sampah (%)	60	15,78	6,94	31,66	31,66	●	Dinas Lingkungan Hidup
	27	Rasio tempat pembuangan sampah per	0,8	0,4	0,3	0,36	0,36	▶	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
	satuan penduduk							
28	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R skala kecamatan	7	1%	0	0,00%	0,00%	▼	Dinas Lingkungan Hidup
29	Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala desa/kelurahan (%)	25	5,1	1,13	1,51	1,51	▼	Dinas Lingkungan Hidup
30	Persentase RW yang memiliki bank sampah (%)	100	26,1	11,3	6,85	6,85	▼	Dinas Lingkungan Hidup
31	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (%)	20	8	7,5	5	5	▷	Dinas Lingkungan Hidup
32	Persentase pengoperasian TPA (%)	80	10	0	40	40	●	Dinas Lingkungan Hidup

Keterangan :



: Telah Tercapai ;



▷: Akan Tercapai;



▼: Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan lingkungan hidup, hingga tahun 2016 dari 32 target indikator RPJMD, terdapat 12 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator yang akan tercapai dan 14 indikator memerlukan perhatian dan upaya keras untuk mencapai target. Guna mencapai target tersebut diperlukan perhatian khusus dan usaha terutama dalam reformasi tata kelola pemerintahan.

3. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.6.

Tabel B.6
Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi i Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggunjwab
						2015	2016			
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan									
	1	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	100	90	88,52	91,57	91,57		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun)	100	99,6	99,58	98,81	98,81		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	3	Rasio kepemilikan akta kelahiran (semua penduduk)	92	79,6	79,03	79,48	79,48		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	4	Rasio kepemilikan akta kematian	80	10,75	10,74	5,5	5,5		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	5	Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin	100	DTD	DTD	0	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	6	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	100	10	0	0	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Keterangan :



: Telah Tercapai ;



: Akan Tercapai;



: Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 6 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator akan tercapai dan 3 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target yaitu rasio kepemilikan akta kematian, rasio kepemilikan akta kelahiran bayi dari rumah tangga miskin dan rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak. Target rasio kepemilikan akta kelahiran bayi dari rumah tangga miskin belum tercapai karena pengukuran indikator tersebut belum dapat dilakukan pada tahun 2016. Pengukuran rasio kepemilikan akta kelahiran bayi dari rumah tangga miskin memerlukan koordinasi lintas OPD seperti Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial dan Permasdes khususnya dalam menentukan rumah tangga miskin sebagai dasar perhitungan. Hingga saat ini, masih dilakukan proses validasi data rumah tangga miskin di Kabupaten Wonosobo melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Guna pencapaian target akhir RPJMD, maka perlu dilakukan pencapaian dan konsistensi pencapaian kinerja khususnya pada indikator yang perlu perhatian tersebut.

7. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 24 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.7.

Tabel B.7
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan dan Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Targ et Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisa si Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggun gjawab b
					2015	2016			
Program Penguatan Otonomi Desa									
1	Jumlah desa dengan tipe swasembada (%)	10	6	5	6,35	6,35	●	Dinsosper masdes	
2	Persentase desa kategori maju (Indeks Desa Membangun) (%)	40	10	DTD	DTD	DTD	▼	Dinsosper masdes	
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa									
1	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu(%)	100	100	99	100	100	●	Bagian Pemerinta hanan	

2	persen desa yang menyampaikan laporan (%) keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu	100	100	99	100	100	●	Bagian Pemerintahan
3	persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu (%)	100	100	99	100	100	●	Bagian Pemerintahan
4	persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat tepat waktu (%)	100	100	DTD	100	100	●	Bagian Pemerintahan
Program Penguatan Otonomi Desa								
1	Jumlah desa dengan tipe swasembada	10	5	5	DTD	DTD	▼	Dinsosper masdes
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa								
1	Jumlah BUMDes	70	20	20	56	56	●	Dinsosper masdes
2	Persentase BUMDes aktif	100	78	75	83	83	●	Dinsosper masdes
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
1	Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa	20	DTD	DTD	DTD	DTD	▼	Bagian Pemerintahan
Program peningkatan kapasitas aparatur								

pemerintah desa								
1	% kepala desa yang mempunyai sertifikasi bidang pemerintahan desa	100	100	89	DTD	DTD	▼	Bagian Pemerintahan
2	% perangkat desa yang mempunyai sertifikat bidang pemerintahan desa	70	30	23	DTD	DTD	▼	Bagian Pemerintahan
3	% BPD yang membahas lap pertanggungjawaban pemerintahan desa tepat waktu	100	100	DTD	DTD	DTD	▼	Bagian Pemerintahan
4	% anggota BPD yang mengajukan usul rancangan perdes	20	20	DTD	DTD	DTD	▼	Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Partispasi Masyarakat dalam membangun desa								
1	Persentase pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun)	50	20	DTD	10	10	▼	Bagian Pemerintahan: Dinsosper masdes
2	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	20	15	15	15	15	●	Bagian Pemerintahan: Dinsosper masdes
3	Rata- rata Persentase kontribusi masyarakat dalam pendanaan pemberdayaan masyarakat	30	5	DTD	DTD	DTD	▼	Bagian Pemerintahan: Dinsosper masdes
4	Persentase pokmas aktif	80	40	DTD	30	30	▶	Bagian Pemerintahan:

								Dinsosper masdes
5	Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes	20	2	DTD	4,7	4,7	●	Bagian Pemerintahan: Dinsosper masdes
6	Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBDes	25	2	DTD	4,23	4,23	●	Bagian Pemerintahan: Dinsosper masdes
7	Persentase Desa yang menginformasikan Rencana pembangunan desa di ruang publik	100	10	DTD	100	100	●	Bagian Pemerintahan: Dinsosper masdes
8	Persentase partisipasi aktif masyarakat kelompok rentan dalam musyawarah desa	80	10	DTD	DTD	DTD	▼	Bagian Pemerintahan: Dinsosper masdes
9	Persentase partisipasi aktif masyarakat kelompok rentan dalam musyawarah desa	100	100	DTD	DTD	DTD	▼	Bagian Pemerintahan: Dinsosper masdes
Program peningkatan keberdayaan masyarakat								
1	Jumlah kelompok masyarakat produktif	265	140	140	DTD	DTD	▼	Bagian Pemerintahan: Dinsosper masdes

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ◁ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 24 target indikator dalam RPJMD

tahun 2016-2021, sebanyak 11 indikator berstatus telah tercapai, 1 target indikator akan tercapai dan 12 indikator memerlukan perhatian dan upaya keras untuk mencapai target. Adapun 12 indikator yang memerlukan perhatian khusus dikarenakan perhitungan indikator-indikator tersebut masih dalam tahap validasi sehingga nilai indikator belum dapat ditampilkan. Oleh karenanya, dalam pencapaian target RPJMD maka perlu dilakukan evaluasi khususnya dalam hal metode pengukuran indikator.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.8.

Tabel B.8
Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Program Keluarga Berencana							
1	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun (%)	30,00	8,81	8,81	8,81	8,81	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2	CPR/ Contraceptive Prevalancy Rate (Prevalensi Peserta KB aktif)(%)	85,20	80,20	80,20	80,46	80,46	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
3	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun(%)	100	100	100	100	100	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
4	Rasio petugas KB /desa(%)	30,00	3,10	3,10	4,03	4,03	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
5	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-	45	90	95	65	65	▼	Dinas Pengendalian

		19(%)							n Penduduk, KB, PP dan PA
2	Program pelayanan kontrasepsi								
	1	Unmetneed(%)	7,57	7,8	7,93	8,36	8,36	▼	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	2	Cakupan kepersertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera(%)	75	48	45	30,01	30,01	▷	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	3	Persentase Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)(%)	45	42	41,08	41,02	41,02	▷	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	4	Drop out KB(%)	10	17,9	18,15	17,2	17,2	▷	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	5	% Kepersertaan KB Pria	4	2,55	2,50	2,33	2,33	▷	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
3	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak								
	1	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	457	451	450	432	432	▷	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
4	Program Pemberdayaan Keluarga								
	1	% anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	87,39	87,34	87,33	87,36	87,36	●	Dinas Pengendalian Penduduk,

									KB, PP dan PA
	2	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina	234	223	222	233	233	●	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	3	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansis (BKL) yang terbentuk dan terbina	40	18	15	6	6	▼	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
5		Program kesehatan reproduksi remaja							
	1	Rata-rata usia kawin pertama perempuan(tahun)	18	17	16,9	16,9	16,9	▷	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	2	Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan (tahun)	20	18	17	17	17	▷	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
	3	% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun %	2	3,10	3,26	5,12	5,12	▼	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 17 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai, 7 target indikator akan tercapai dan 4 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target yaitu *Age Specific Fertility Rate*, *unmetneed*, jumlah kelompok bina keluarga lansia yang terbina dan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun. Praktek menikah usia dini, terutama untuk perempuan, masih terjadi di Kabupaten Wonosobo. Rata-rata usia kawin pertama untuk perempuan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 masih berada pada 16,9 tahun. Hal ini berkorelasi pada

indikator usia istri di bawah 20 tahun pada pasangan usia subur yang masih relatif cukup tinggi yaitu 5,12 % dengan target pada tahun 2016 sebesar 3,10%.

9. Urusan Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan **Perhubungan** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.9.

Tabel B.9
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan							
1	Persentase jalan lingkaran baru yang terbangun terhadap rencana jalan lingkaran yang ditetapkan (%)	50	55	0	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten (%)	100		100	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
3	Persentase simpang jalan strategis simpang jalan perkotaan yang dilakukan perhitungan LHR pada jam sibuk (%)	50	0	0	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
4	Persentase spot parkir on street yang tertata (%)	100	65	60	71	71	◀	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5	Persentase tersedianya gedung parkir	100	10	0	0	0	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
6	Persentase tersedianya halte terhadap total kebutuhan halte	50	12	10	10	10	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Ururan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
						Tahun 2015	Tahun 2016			
										Perhubungan
	7	rasio jumlah kendaraan (unit SMP) per panjang jalan (km)		95	95	95	95	95	●	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
2	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ									
	8	persentase tersedianya perlengkapan jalan (rambu , marka, dan guard rail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten (%)		100	73	68	DTD	DTD	▼	
	9	Angka fatalitas korban kecelakaan transpostasi jalan		Me nurun	Me nurun	DTD	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	10	Persentase terminal kewenangan kabupaten yang direvitalisasi (%)		100	33	33	40	40	▼	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
3	Program peningkatan pelayanan angkutan									
	11	Persentase angkutan umum laik pakai (%)		100	67	60	69	69	●	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	12	Persentase Pelayanan angkutan jalan (%)		75	87,5	45,14	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Ururan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
						Tahun 2015	Tahun 2016			
	13	Persentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil (%)		80	61	6	70	70	●	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	14	Rasio ijin trayek		0,8	0,20	0,1	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	15	Persentase pelayanan pengujian kendaraan bermotor (%)		75	59,45	56,34	59,45	59,45	●	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
4	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas									
	16	persentase tersedianya perlengkapan jalan (rambu , marka, dan guard rail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten (%)		100	73,33	68	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	17	Jumlah titik blackspot yang tertangani (%)		100	28,57	28,57	28,57	28,57	●	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	18	Persentase sekolah di tepi jalan protokol yang terpasang zona selamat sekolah (%)		80	35	30	50	50,	●	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5	Program peningkatan tertib lalu lintas									
	19	Jumlah persimpangan wajib APILL terpasang APILL		10	4	4	4	4	●	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
								n dan Perhubungan
20	Tersedianya area bongkar muat barang layak	5	DTD	0	DTD	DTD	▼	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perhubungan, terdapat 20 indikator yang menjadi target dalam RPJMD. Hingga tahun 2016, dari 20 indikator tersebut terdapat 7 indikator yang telah tercapai, 1 indikator yang akan tercapai dan 12 indikator yang memerlukan upaya keras untuk mencapai. Sebagian besar indikator yang tidak tercapai tersebut, seperti persentase tersedianya perlengkapan jalan, memerlukan survei lapangan agar dapat mengukur ketercapaian indikator. Hingga saat ini, survei masih dilakukan dikarenakan lokus yang luas sehingga data ketercapaian indikator belum dapat disajikan.

10. Urusan Komunikasi dan Informasi

Kinerja penyelenggaraan urusan **Komunikasi dan Informasi** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.10.

Tabel B.10
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi							
1	Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blue	65	40	35	44,44	44,44	●	Dinas Komunikasi dan Informatika

Ururan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
	print TIK (%)							
	2 Prosentase SKPD yang menerapkan e-Government (%)	75	83	25	DTD	DTD	▼	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi						▼	
	3 Prosentase penerapan tata naskah dinas elektronik (%)	75	10	0,025	0	0		Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa							
	4 Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	100	DTD	DTD	14	14	▼	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Program kerjasama informasi dan media massa/ Program kerjasama informasi dengan mas media							
	5 Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan pemkab	60	25	DTD	DTD	DTD	▼	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi							
	6 Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	50	63	25	25,32	25,32	▼	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
	berbasis TIK (%)							

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika, dari 6 indikator RPJMD hingga tahun 2016 terdapat 1 indikator yang telah tercapai dan lima indikator yang memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Kelima indikator tersebut antara lain persentase SKPD yang menerapkan e-government, persentase penerapan tata naskah dinas elektronik, persentase website perangkat daerah yang memiliki menu pengaduan masyarakat, persentase media massa nasional yang melakukan mou dengan Pemkab dan persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK. Pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo masih bergantung pada sistem konvensional sehingga adopsi penerapan TIK masih sulit dilakukan. Hal ini salah satunya dikarenakan komposisi PNS di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh golongan II dan berpendidikan SMA. Hal tersebut menjadi tantangan bagi reformasi tata kelola pemerintahan berbasis TIK.

11. Penyelenggaraan Urusan Koperasi

Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 15 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.11.

Tabel B.11
Capaian Kinerja Urusan Koperasi

Urusan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPDPenang gungjawab
				2015	2016			
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif							
1	Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM (%)	98,82	98,79	98,78	99,83	99,83	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM

	2	Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi (%)	10	4	2	4,00	4,00	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	3	Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM (%)	0,50	0,15	0,10	0,16	0,16	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	4	Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru (%)	10	2,50	2	2,51	2,51	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	5	Persentase koperasi terhadap jumlah UMKM (%)	5	2,1	2	2,20	2,20	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2		Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah							
	1	Persentase kenaikan Jumlah UMKM (%)	15	5,0	3	6,00	6,00	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	2	Persentase kenaikan Aset UMKM (%)	15	5,0	3	5,10	5,10	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	3	Persentase kenaikan Omset UMKM (juta) (%)	15	5,0	3	5,00	5,00	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
3		Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah							
	1	Persentase Koperasi yang mampu	95	71	65	71,00	71,00	●	Dinas Perdagangan,

		mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan (%)							Koperasi dan UMKM
	2	Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan (%)	20	7	4	7,00	7,00	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	3	Persentase UMKM memiliki perijinan (%)	2150	64	60	65,00	65,00	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
4		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							
	1	Persentase kenaikan Aset Koperasi (%)	6,50	2,20	1,20	2,21	2,21	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	2	Persentase kenaikan Omset Koperasi (%)	6,50	2,20	1,20	2,21	2,21	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	3	Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif (%)	100,00	55,00	50,00	57,00	57,00	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	4	Persentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah koperasi (%)	75	65	63	66,00	66,00	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Koperasi, terlihat sampai dengan tahun 2016 dari 15 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, semua target indikator telah tercapai. Namun, tetap diperlukan upaya agar tercipta konsistensi pencapaian target indikator.

12. Urusan Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.12.

Tabel B.12
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD	
				2015	2016				
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
	1	Persentase kenaikan jumlah kerjasama investasi (%)	30	10	10	0,00	0,00	▼	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi								
	1	Persentase kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMDN)(%)	0,2	0	DTD	0,00	0,00	●	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2	Jumlah Nilai investasi (PMDN)(trilyun)	2,37	1,37	1,09	1,86	1,86	●	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	3	Daya Serap Tenaga Kerja (perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap PMDN dan PMA)	1200 : 8	33	33	97,9	97,9	●	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	4	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP(%)	97	66,67	66,67	38,19	38,19	▼	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	5	Persentase implementas	100	80	70	100	100	●	Dinas Penanaman

		i SPIPISE(%)							Modal dan PTSP
	6	Rata-rata lama proses perijinan (hari)	4	7	7	4	4	●	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	7	Persentase investasi ramah lingkungan(%)	50	DTD	20	DTD	DTD	▼	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah								
	1	Persentase potensi investasi yang sudah memiliki FS (%)	50	10	0	16	16	●	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ◀ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan **Penanaman Modal** sampai tahun 2016 dari sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai, dan 3 target indikator memerlukan perhatian untuk mencapai yaitu persentase jumlah kerjasama investasi, persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP dan persentase investasi ramah lingkungan. Guna mencapai target indikator tersebut diperlukan upaya keras terutama dalam meningkatkan dan memilah investasi agar mampu menunjang PAD daerah.

13. Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.13.

Tabel B.13
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda							
1	1 Persentase organisasi pemuda yang berbadan hukum(%)	90	10	10	10	10	●	Dikpora
2	2 Persentase organisasi pemuda yg difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan manajemen kepemudaan(%)	15	5	5	6	6	●	Dikpora
3	3 Persentase organisasi pemuda aktif(%)	90	40	40	45	45	●	Dikpora
2	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga							
1	1 Persentase komunitas olahraga aktif(%)	60	25	25	25	25	●	Dikpora
2	2 Rasio klub olahraga terhadap jumlah penduduk	2,5	0,652	0,652	0,863	0,863	●	Dikpora
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga						●	
1	1 Persentase kenaikan prestasi olahraga tk prov , nasional(%)	40	DTD	DTD	1	1	▼	Dikpora
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga							
1	1 Rasio Gelanggang Olah Raga per 1.000 Penduduk	1,9	1,81	1,81	1,96	1,96	▷	Dikpora
2	2 Rasio Lapangan Olah Raga per 10.000 Penduduk	0,0030	0,0024	0,0024	0,0052	0,0052	●	Dikpora
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan							
1	1 Persentase kenaikan jumlah pemuda berprestasi(%)	20	DTD	DTD	1	1	▼	Dikpora
	Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba							
1	1 Persentase pemuda dengan kasus narkoba terhadap seluruh kasus narkoba(%)	10	10	DTD	DTD	DTD	▼	Dikpora

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 10 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai, 1 target indikator akan tercapai dan 3 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target yaitu persentase kenaikan prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional, persentase kenaikan jumlah pemuda

berprestasi dan persentase pemuda dengan kasus narkoba terhadap seluruh kasus narkoba. Guna mencapai target RPJMD maka diperlukan fasilitasi pembinaan bagi pemuda yang memiliki bakat.

14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan **Statistik** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel C.14.

Tabel C.14
Capaian Kinerja Urusan Statistik

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah							
1	Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS (%)	DTD	4	4	1	1	▼	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS (%)	DTD	10	10	10	10	●	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala (%)	100	70	60	24	24	▼	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Persentase PD yang menyediakan informasi publik wajib setiap saat (%)	100	70	60	24	24	▼	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Persentase Publikasi data/kajian wajib yang diupdate	100	70	65	24	24	▼	Dinas Komunikasi dan Informatika

Keterangan :



: Telah Tercapai ;



: Akan Tercapai;



: Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan statistik, hingga tahun 2016 dari 5 target indikator RPJMD, terdapat 1 indikator yang telah tercapai dan empat indikator yang memerlukan perhatian dan upaya keras untuk mencapai target. Guna mencapai target tersebut diperlukan perhatian khusus dan usaha terutama dalam reformasi tata kelola pemerintahan.

15. Urusan Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan **Persandian** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.15.

Tabel B.15
Capaian Kinerja Urusan Persandian

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi							
1	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	0,8	0,6	DTD	0,53	0,53	◁	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	0,9	0,6	DTD	1	1	●	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,6	DTD	1	1	●	Dinas Komunikasi dan Informatika

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan **Persandian** sampai tahun 2016 dari sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 1 target indikator akan tercapai.

16. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021.

Tabel B.16
Capaian Kinerja Kebudayaan

Urusan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				2015	2016			
1	Program Pengembangan Nilai Budaya							
1	Persentase kebudayaan /tradisi yg ditetapkan sebagai tradisi /kebudayaan daerah (%)	80	30	DTD	44,85	44,85	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase komunitas filantropi aktif (%)	65	40	DTD	68,42	68,42	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya berbasis kearifan lokal (%)	80	55	50	60,00	60,00	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							
1	Rasio Benda Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik	0,8	0,6	DTD	0,5	0,5	◁	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase Benda/ Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	60	49	48	25,19	25,19	▼	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	15	11	11	25	25	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

									an
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya								
	1	Rasio kelompok kesenian yang terdaftar terhadap kelompok kesenian yang ada	0,7	0,60	DTD	0,3	0,3	▼	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Persentase kelompok kesenian aktif (%)	80	50	DTD	40,00	40,00	▷	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya								
	1	Rasio kerjasama daerah bidang kebudayaan terhadap seluruh kerjasama daerah	0,3	0,05	DTD	100%	100%	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kebudayaan, sampai dengan tahun 2016 dari sejumlah 9 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator akan tercapai dan 2 indikator memerlukan perhatian dan upaya keras dalam mencapai target yaitu persentase benda/cagar budaya yang dilestarikan, rasio kelompok kesenian yang terdaftar terhadap kelompok kesenian yang ada.

17. Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.17.

Tabel B.17
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggung jawab
				2015	2016			
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan							
1	Rata- rata Kemampuan membaca cepat anak SD (kata/menit)	120	120	DTD	DTD	DTD	▼	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Rata- rata Kemampuan membaca cepat anak SMP(kata/menit)	200	200	DTD	DTD	DTD	▼	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Rata- rata Kemampuan membaca cepat anak SMA(kata/menit)	250	250	DTD	DTD	DTD	▼	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Jumah Perpustakaan	893	908	798	798	798	▷	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Jml Pengunjung perpustakaan	292.000	297.840	255.842	207.674	207.674	▼	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Jumlah referensi digital	1200	1263	817	817	817	▼	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	Jumlah pelajar/mahasiswa yang berkunjung	204.400	208.488	179.089	155.756	155.756	▼	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perpustakaan, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 7 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 1 indikator berstatus akan tercapai, sedangkan 6 indikator lain masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Indikator berupa kemampuan membaca cepat memerlukan kerjasama dengan perangkat daerah lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal pengukuran indikator.

18. Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

Kinerja pada urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel B.18.

Tabel B.18
Capaian Kinerja Kearsipan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah							
1	Pengelolaan arsip secara baku (jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku/ jumlah SKPD)x100% (%)	100	104	82,50	90,00	90,00	▶	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Jumlah OPD, Desa/ kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis (%)	82%	30%	DTD	DTD	DTD	▼	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi							
1	Persentase PD yang telah menerapkan tata naskah dinas elektronik (%)	75	5	0,026	0,026	0,026	▼	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat (%)	75	50	DTD	14,00	14,00	▼	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan							
1	Persentase Pelaksanaan sistem kearsipan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) (%)	100	25	DTD-	90,00	90,00	●	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kearsipan, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 5 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, 1 target indikator akan tercapai dan 3 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target yaitu jumlah OPD, desa/ kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis, persentase PD yang telah menerapkan tata naskah dinas elektronik dan Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat. Penerapan tata naskah dinas elektronik dan pemasangan menu pengaduan masyarakat pada *website* perangkat daerah dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2016 penerapan tersebut masih dalam tahap awal (*early stage*) di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Wonosobo, sehingga pemanfaatannya belum maksimal.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel C.1

Tabel C.1
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggung jawab
				2015	2016			
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan							
1	Persentase kenaikan luas lahan perikanan (Ha)	5,80%	3%	3%	-15,34%	-15,34%	▼	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi (kg)	10,0%	2%	2%	5,55%	5,55%	●	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Persentase kenaikan produksi benih ikan (kg)	5,0%	2%	2%	1,33%	1,33%	▶	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Rata-rata konsumsi ikan per kapita (kg/kapita/th)	13,84	13,35	13,31	13,43	13,43	●	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap							
1	Persentase kenaikan pengolahan hasil perikanan	906,68 2	748,27 2	716,59	DTD	DTD	▼	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan							

	1	Rasio anggota kelompok tani ikan terhadap jumlah petani ikan/nelayan	50,40	50,15	50,1	9,65%	9,65%	▼	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan								
	1	Pengolahan hasil perikanan (ton)	33,98%	13,98%	10%	43,94 ton	43,94 ton	●	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2	Persentase ekport hasil perikanan terhadap total ekport non migas	10,00%	1,50%	DTD	15,66%	15,66%	●	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

2. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

Kinerja pada urusan pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel C.2.

Tabel C.2
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir Rpjmd	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							
1	Persentase kenaikan kunjungan per obyek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata (%)	30,00	6	5	28,95	28,95	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
1	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	15	8	7,62	2,33	2,33	▼	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

	2	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan (%)	30,00	6,00	5,00	28,95	28,95	▼	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Persentase Kunjungan wisatawan nusantara (%)	30,00	6,00	5,00	29,41	29,41	▼	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	4	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara terhadap seluruh wisatawan (%)	30,00	DTD	5,00	0,22	0,22	▼	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	5	Rata-rata lama tinggal wisatawan	3	2,2	2	2	2	▶	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif								
	1	Jumlah komunitas ekonomi kreatif	8	4	4	4	4	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Persentase komunitas kreatif yang terfasilitasi dalam ruang/arena kreasi (%)	100	20	DTD	31,43	31,43	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Persentase orang kreatif yang menjadi wirausaha (%)	30	5	DTD	11,87	11,87	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	4	Persentase produk kreatif yang terfasilitasi pameran (%)	30	5	DTD	45,16	45,16	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Program Pengembangan Kemitraan								
	1	Persentase kerjasama pariwisata terhadap seluruh MOU (%)	1	0	DTD	100	100	●	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pariwisata, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 11 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai, 1 target indikator akan tercapai dan 4 indikator memerlukan perhatian dan upaya keras dalam mencapai target yaitu Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, Persentase kenaikan kunjungan wisatawan, Persentase Kunjungan wisatawan nusantara. Indikator yang belum tercapai dikarenakan kurang gencarnya promosi wisata sehingga masih banyaknya lokasi wisata yang belum ter-exspose dan masih minimnya atraksi pertunjukan dan kebudayaan dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

19. Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 25 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel C.3.

Tabel C.3
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan							
1	Produksi tanaman pangan (ton)	453.344	470.366	402.069	474.421	474.421	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	- Padi	161.966	165.756	104.093	167.165	167.165	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	- Jagung	107.452	114.570	101.123	77.369	77.369	▷	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	- Ubi kayu	164.714	171.944	188.724	207.924	207.924	●	Dinas Pangan, Pertanian,

									dan Perikanan
		- Ubi jalar	19.212	18.096	8.129	21.963	21.963	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	2	Produktivitas Tanaman pangan/padi (ton/ha)	5,54	5,12	5,10	5,51	5,51	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	3	Jumlah produksi hortikultura (kw)	2.244.048	2.042.516	1.983.025	4.971.225	4.971.225	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	4	Jumlah produksi buah-buahan (kw)	1.395.400	1.396.795	1.389.305	1.462.206	1.462.206	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	5	Jumlah produksi tanaman biofarmaka (kw)	1.395.400	1.396.795	3.140.867	6.274.477	6.274.477	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	6	Jumlah produksi bunga (tangcai)	2.678.925	2.670.425	2.710.124	3.189.117	3.189.117	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	7	Jumlah produksi perkebunan (ton)	5.883	5.598	8.482,17	8.522,12	8.522,12	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	8	Peningkatan level sertifikasi untuk komoditas*	lanjut	pertama	pertama	pertama, ketiga	pertama, ketiga	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan

2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan								
	1	Persentase teknologi tepat guna bidang pertanian yang sudah diterapkan	50%	10%	10%	15,00%	15,00%	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	2	persentase luasan lahan pertanian/perkebunan ramah lingkungan (pertanian organik, pertanian sesuai kaidah konservasi)	5%	1%	0	1,00%	1,00%	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	3	rasio petani yang melakukan usaha pertanian organik	10%	5%	5%	5,00%	5,00%	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	4	persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap total komoditas pertanian	20%	5%	5%	5,00%	5,00%	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan								
	1	Persentase ekspor hasil pertanian terhadap total ekspor non migas	2%	2%	DTD	1,57%	1,57%	▷	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan								
	1	Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	23.982	22.615	22.341	22.218	22.218	▷	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	2	Jumlah Populasi Ternak Kecil (ekor)	307.596	263.644	256.053	264.138	264.138	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan

									Perikanan
	3	Jumlah Populasi Unggas (ekor)	2.139.252	1.272.905	1.117.738	2.925.696	2.925.696	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	4	Jumlah Produksi Telur (kg)	2.018.000	2.121.199	1.398.801	1.787.369	1.787.369	▷	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	5	Jumlah Produksi Susu (liter)	995,15	1.016,05	869,75	744.792	744.792	▷	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	6	Jumlah Produksi Daging (kg)	10.816.000	11.461.365	6.943.811	7.110.374	7.110.374	▼	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
5		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak							
	1	Persentase kasus ternak yang tertangani(%)	100	80	80	78	78	▷	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
6		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan							
	1	Jumlah temuan teknologi tepat guna bidang pertanian yang sudah diterapkan	6 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
7		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan							
	1	Persentase kenaikan pasokan produk	30	15	10	10	10	▷	Dinas Pangan,

		peternakan ke perusahaan pengolah(%)							Pertanian, dan Perikanan
8		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							
	1	Rasio anggota kelompok tani terhadap petani	30,00	28,72	28,47	28,47	28,47	▷	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	2	Rasio anggota kelompok tani ternak terhadap peternak	5,40	5,30	5,29	5,29	5,29	▷	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
9		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan							
	1	Persentase penyuluh yang memiliki pendidikan formal pertanian dan peternakan(%)	90	50	50	65	65	●	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Keterangan :



: Telah Tercapai ;



: Akan Tercapai;



: Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan tenaga kerja, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 25 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 15 indikator berstatus telah tercapai, 9 target indikator akan tercapai dan 1 indikator memerlukan perhatian untuk mencapai target yaitu jumlah produksi daging. Sebagian besar penduduk Kabupaten Wonosobo memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan mengolah lahan pertanian. Kepemilikan hewan ternak berupa ayam, kambing dan sapi masih relatif sedikit. Petani cenderung memilih ikan sebagai hewan ternak. Oleh karenanya, pencapaian target jumlah produksi daging belum tercapai pada tahun 2016.

4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Kinerja penyelenggaraan urusan **Energi dan Sumber Daya Mineral** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel C.4.

Tabel C.4
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				2015	2016			
1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan							
1	Persentase rumah tangga yang teraliri listrik (elektrifikasi) (%)	100	100	100	100	100	●	
2	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	110	110	110	110	110	●	
3	persentase PLTMH yang beroperasi(%)	7,14	2,38	1,43	3,33	3,33	●	
2	Program pembinaan dan pengembangan bidang energi							
1	Persentase desa yang mengembangkan biogas	1 per tahun	1	1 per tahun	DTD	DTD	▼	
4	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan							
1	Persentase luas lahan rusak akibat pertambangan (%)	0,017	0,022	0,022	DTD	DTD	▼	

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral sampai tahun 2016 dari sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai dan 2 target indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai yaitu oersentase desa yang mengembangkan biogas dan persentase luas lahan rusak akibat pertambangan. Pemanfaatan biogas mampu dijadikan sumber energi utama untuk rumah tangga terutama di pedesaan. Agar hal ini tercapai maka memerlukan upaya keras terutama dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain.

5. Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

Kinerja pada urusan perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel C.5.

Tabel C.5
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan							
1	Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok	1	0,84	0,8	0,8	0,8	▷	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2	Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida	0,5	0,1	DTD	0,1	0,1	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2	Program Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah							
1	Persentase kenaikan UDKM (%)	30	13	10	15,00	15,00	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri							
1	Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar	8	5	DTD	5,5	5,5	●	Dinas Perdagangan

									an, Koperasi dan UMKM
	2	Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang	25	20	20	19,1	19,1	▶	Dinas Perdagang an, Koperasi dan UMKM
4		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional							
	1	Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdagangan terhadap semua kerjasama	0,2	0,04	DTD	0,04	0,04	●	Dinas Perdagang an, Koperasi dan UMKM
	2	Persentase kenaikan negara tujuan ekspor (%)	12,50	10	10	25,00	25,00	●	Dinas Perdagang an, Koperasi dan UMKM
5		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor							
	1	Nilai Ekspor bersih perdagangan	66,7 juta USD	51 juta USD	50.12 3.595 USD	\$47.208. 997,90	\$47.208.99 7,90	▶	Dinas Perdagang an, Koperasi dan UMKM
6		Program Peningkatan Infrastruktur Perdagangan							
	1	Persentase los/kios yang dimanfaatkan (%)	90	60	DTD	60	60	●	Dinas Perdagang an, Koperasi dan UMKM
	2	Persentase pasar Tradisional yang direvitalisasi (%)	70	38	30	53,85	53,85	●	Dinas Perdagang an, Koperasi dan UMKM
7		Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan							
	1	Penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya (%)	2	0,30	DTD	0,3	0,3	●	Dinas Perdagang an, Koperasi dan UMKM

Keterangan :



: Telah Tercapai ;



▶ Akan Tercapai;



▼ Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perdagangan, sampai dengan tahun 2016 dari 11 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, 3 target indikator akan tercapai dan dari 11 target indikator tidak ada yang memerlukan perhatian dan upaya keras dalam mencapai target.

6. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 19 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel C.6.

Tabel C.6
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab	
				2015	2016				
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
	1	Pertumbuhan industri kecil (%)	6,25	5,5	5,35	3,12	3,12	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	2	Pertumbuhan industri menengah(%)	9%	3%	2%	0	0	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	3	Pertumbuhan industri besar (%)	0,50%	0	DTD	0	0	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	4	Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri	9%	3,20%	2%	2,5	2,5	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	5	Persentase industri kecil yang berijin	90,00%	67,00%	60,00%	62,00%	62,00%	▷	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	6	Persentase kenaikan Jumlah Tenaga kerja sektor industri	15,00%	4,00%	2,00%	3,24%	3,24%	▷	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi

									Transmigrasi
2	Program Penataan Struktur Industri								
	1	Persentase usaha industri baru, jenis usaha industri baru, penetapan industri inti/prioritas	49%	18%	10%	11,00%	11,00%	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	2	Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju	20%	4%	0%	0,00%	0,00%	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	3	Persentase klaster yang memiliki SOP	100%	40%	40%	33,33%	33,33%	▶	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	4	Persentase kenaikan jumlah klaster	40%	20%	0	33,33%	33,33%	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
3	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensia								
	1	Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra industri potensial	15,00%	4,00%	2,00%	3,75%	3,75%	▶	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	2	Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra)	15,00%	4,00%	2,00%	3,23%	3,23%	▶	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
6	Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan sistem produksi								
	1	Jumlah produk yang berstandar nasional	3	0	0	1	1	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	2	Jumlah produk yang berstandar	1	0	0	1	1	●	Dinas Tenaga Kerja,

		internasional							Perindustrian, dan Transmigrasi
3		Persentase merk produk industri bersertifikat halal	100%	30%	30%	30,00%	30,00%	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
4		% IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product	5,2	4,2	4	0	0	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
5	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal								
1		Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK	6	3	3	3	3	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
2		Persentase kenaikan produksi unggulan daerah	30%	5%	DTD	2,00%	2,00%	▼	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
7	Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri								
1		% IK yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna	8,26	7	6,75	6,75%	6,75%	▷	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi

Keterangan :



: Telah Tercapai ;



: Akan Tercapai;



: Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perindustrian, sampai dengan tahun 2016 dari sebanyak 19 target indikator dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai, 6 target indikator akan tercapai dan 7 indikator memerlukan perhatian untuk mencapai target. Penguatan sektor industri terutama pertumbuhan jumlah wirausaha baik pada industri kecil maupun menengah mampu mengurangi angka kemiskinan yang menjadi isu pembangunan utama di Kabupaten Wonosobo. Oleh karenanya, pencapaian target RPJMD urusan perindustrian ini menjadi vital. Ketidaktercapaian target pada urusan perindustrian ini dikarenakan belum terintegrasinya target RPJMD Kabupaten Wonosobo ke dalam Renstra maupun Renja OPD. Hingga tahun 2017 masih dilakukan proses penyesuaian dan penyusunan target RPJMD ke dalam Renstra dan Renja OPD.

7. Urusan Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan **Transmigrasi** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel C.7

Tabel C.7
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD OPD	OPD
				2015	2016			
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi							
	1 Persentase kenaikan jumlah transmigran (%)	10	10	DTD	40	40	●	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan **Transmigrasi** sampai tahun 2016 sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021 telah tercapai yaitu persentase kenaikan jumlah transmigrasi. Namun demikian, upaya tetap dibutuhkan untuk mencapai konsistensi pencapaian target.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan urusan **Perencanaan** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel D.1.

Tabel D.1
Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
	1 Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	80	70	100	100	●	BAPPEDA

Urusan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
						Tahun 2015	Tahun 2016			
2		Persentase kesesuaian Program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD (%)		100	90	85	100	100	●	BAPPEDA
3		Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPD (%)		100	80	70	86	DTD	●	BAPPEDA
4		Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		> 3 ST	> 3 ST	2,80 T	3,08 ST	3,08 ST	●	BAPPEDA
5		Persentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu (%)		100	80	70	100,	100	●	BAPPEDA
6		Persentase serapan kegiatan dan anggaran (%)		100	90	86,78	89,83	89,83	▷	BAPPEDA
2		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								
7		Persentase aparat perencana yang memiliki sertifikat diklat perencanaan (%)		100	30	26	36	36	●	BAPPEDA
3		Program Pengembangan data/informasi								
8		Persentase keterisian format data dan informasi dalam sistem informasi pembangunan daerah (%)		100	100	80	100	100	●	BAPPEDA
9		Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (%)		100	100	DTD	77	77	▷	BAPPEDA
3		Program Perencanaan Sosial Budaya								
10		Persentase dokumen perencanaan sosial budaya yang terimplementasi dalam kegiatan OPD (%)		100	80	75	70	70	▷	BAPPEDA
4		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi								
11		Persentase kenaikan produksi produk		30%	2%	DTD	DTD	DTD	▼	BAPPEDA

Urusan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
						Tahun 2015	Tahun 2016			
		unggulan dalam OVOP dan ODOP								
	12	Persentase Kenaikan jumlah/jenis produk unggulan dalam OVOP dan ODOP		30%	2%	DTD	DTD	DTD	▼	BAPPEDA
	13	Jumlah pengembangan kawasan pedesaan berbasis OVOP		8	1	DTD	DTD	DTD	▼	BAPPEDA
5	Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam/Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam									
	14	Persentase dokumen perencanaan wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasi dalam DED (%)								BAPPEDA
5	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam									
	15	Persentase kenaikan Jumlah desa yg menjadi pusat pertumbuhan (%)		18	3	0	0	0	▼	BAPPEDA
	16	Tingkat aksesibilitas (panjang Jalan/ Luas wilayah) (%)		80	79,33	79,20	79,20	79,20	▶	BAPPEDA
	17	Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan wilayah dan sumber daya alam (%)		90	70	DTD	50	50	▶	BAPPEDA
6	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh									
	18	Persentase KSCT (kawasan strategis cepat tumbuh) yang dilegalisasi (%)		80	20	0	0	0	▼	BAPPEDA
	19	Persentase Panjang jalan kawasan perbatasan dalam kondisi baik dan sedang (%)		60		40	45	45	▶	BAPPEDA
7	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana									
	20	Persentase kecamatan yang sudah memiliki		100	27,50	13	13	13	▶	Badan Penanggulanga

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Rpjmd 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
	pemetaan detail rawan bencana (%)							n Bencana Daerah
21	Persentase Desa Rawan bencana yang terpasang EWS (early warning system) (%)	20	5%	2%	2	2	▷	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	persentase dokumen rencana kontinjensi yang tersusun terhadap total jenis bencana (%)	75	25	12,5	25	25	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	rapor ketangguhan bencana (%)	baik	baik	DTD	sedang	sedang	▷	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontinjensi (%)	100	27	12,50	12,50	12,50	▼	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, dari sebanyak 24 target indikator diketahui bahwa 8 target indikator berstatus telah tercapai, 8 target indikator berstatus akan tercapai dan 8 target indikator perlu upaya keras. Indikator yang capaiannya berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase kenaikan Jumlah desa yg menjadi pusat pertumbuhan, Persentase KSCT (kawasan strategis cepat tumbuh) yang dilegalisasi, Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontinjensi, Persentase kenaikan produksi produk unggulan dalam OVOP dan ODOP, persentase kenaikan jumlah/jenis produk OVOP dan ODOP dan jumlah pengembangan kawasan pedesaan berbasis OVOP. Perlu upaya keras dan melakukan langkah-langkah percepatan agar indikator yang berstatus perlu upaya keras dapat memenuhi target di tahun mendatang.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan urusan **Keuangan** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel D.2.

Tabel D.2
Capaian Kinerja Keuangan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
	1 Opini BPK	WTP	WDP	WDP	sedang proses audit	sedang proses audit		BPPKAD
	2 Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	65	90	90		BPPKAD
	3 Predikat SAKIP	B	B	C	B	B		BPPKAD
	4 persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI) (%)	100	80	75	80	80		BPPKAD
	5 Persentase tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap (%)	100	100	100	100	100		BPPKAD
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
	6 %Ketepatan waktu penyampaian	100	100	90	90	90		BPPKAD

Urusan dan Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
					Tahun 2015	Tahun 2016			
		laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005 (%)							
	7	% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungja waban pelaksanaan APBD	100	100	100	90	90		BPPKAD
	8	% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.	100	70	55	80	80		BPPKAD
	9	Persentase kenaikan PAD (%)	25	4,16	4,16	7,40	7,40		BPPKAD
	10	Rasio realisasi PAD	100	100	104,65	110	110		BPPKAD
	11	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja (%)	Me nurun	Me nurun	55	47,54	47,54		BPPKAD
	12	Persentase Realisasi Belanja Modal (%)	99	75	47	73,57	73,57		BPPKAD
	13	Persentase Realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur (%)	100	100	DTD	97,86	97,86		BPPKAD
	14	Persentase belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah (%)	Me ningkat	Me ningkat	16,38	17,12	17,12		BPPKAD
	15	Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja (%)	Me ningkat	Me ningkat	14,16	19,25	19,25		BPPKAD
	16	Persentase realisasi belanja barang	100	90	85	85,54	85,54		BPPKAD

Urusan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
					Tahun 2015	Tahun 2016				
		dan jasa (%)								
	17	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	20	12,18	10,62	12,54	12,54		BPPKAD	
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota									
	18	Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan Daerah	DTD	11,988	13,32	11,43	11,43		BPPKAD	
4	Program Pengembangan BUMD			*						
	19	Persentase peningkatan BUMD Berkinerja baik (%)	80%	70%	70%	70,00%	70,00%		BPPKAD	
	20	Persentase Kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD (%)	8,39%	6.91%	6,84%	6,12%	6,12%		BPPKAD	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	21	Persentase Realisasi belanja barang /jasa (eks BAU) (%)	100%	100%	DTD	85,00%	85,00%		BPPKAD	
	22	Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	DTD	79,83%	79,83%		BPPKAD	
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
	23	Persentase Realisasi	100	100	DTD	97,86	97,86		BPPKAD	

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
	belanja pemeliharaan sarpras aparatur (%)							
24	Persentase aset daerah dalam kondisi baik (%)	85	75	DTD	80	80	●	BPPKAD
25	Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur (%)	99,00	90,00	DTD	73,56	73,56	▷	BPPKAD

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan keuangan, dari 25 indikator RPJMD, hingga tahun 2016 terdapat 11 indikator yang telah tercapai dan 14 indikator yang akan tercapai. Pada urusan ini tidak terdapat indikator yang memerlukan perhatian dan upaya khusus untuk mencapai. Akan tetapi, upaya untuk mencapai indikator yang akan tercapai tetap perlu dilakukan.

3. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan urusan **Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan** ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel D.3

Tabel D.3
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Persentase capaian sasaran kinerja pegawai dengan target	90	82	80	82	82	●	BKD
2	Persentase OPD dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)	80	75	70	74,07	74,07	▷	BKD

Ururan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKP		Realisasi Capaian Rpjmd s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
3	Persentase zone integritas yang terbentuk	DTD	5%	2,56%	2,56%	2,56%	▼	BKD
2	Program Penataan Kelembagaan							
4	Persentase struktur jabatan dan eselonering yang terisi(%)	100	100	95	93,36	93,36	▷	BKD
3	Program Pendidikan Kedinasan							
5	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya(%)	70	60	60	73,08	73,08	▷	BKD
3	Program pembinaan dan pengembangan aparatur							
6	Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan(%)	100	68	65	69,81	69,81	●	BKD
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
7	Persentase pegawai ASN yang mendapat Hukuman Disiplin (Berat, Sedang, Ringan) (%)	0	DTD	0,024	0,0009	0,0009	▼	BKD

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan **Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**, dari sebanyak 7 target indikator diketahui bahwa 2 target indikator berstatus telah tercapai, 3 target indikator berstatus akan tercapai dan 2 target indikator perlu upaya keras. Indikator yang capaiannya berstatus perlu upaya keras yaitu persentase zone integritas yang terbentuk dan persentase pegawai ASN yang mendapat hukuman disiplin. Perlu upaya keras dan melakukan langkah-langkah percepatan agar indikator yang berstatus perlu upaya keras dapat memenuhi target di tahun mendatang.

4. Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel D.4.

Tabel D.4
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab	
				2015	2016				
1	Program pengkajian dan penelitian								
	1	Persentase hasil litbang yang terpublikasikan	15	10	10	DTD	DTD	▼	BAPPEDA

Keterangan :



: Telah Tercapai ;



: Akan Tercapai;



: Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan, sampai dengan tahun 2016 terdapat satu indikator yang memerlukan upaya keras untuk mencapai yaitu persentase hasil litbang yang terpublikasikan. Pelaksanaan fungsi litbang masih tergolong baru di BAPPEDA sehingga upaya pencapaian target tersebut belum optimal.

5. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kinerja penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel D.5.

Tabel D.5
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
						Tahun 2015	Tahun 2016			
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik									
	1	Persentase penerapan SPP dan SOP pada OPD (%)	100	60	52	71,01	71,01		Bagian Organisasi Setda	

Ururan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
2	Rata-rata persentase pencapaian SPM oleh OPD (%)	100	85	80	80	80	▶	Bagian Organisasi Setda
3	Persentase unit pelayanan yang melaksanakan layanan sesuai dengan SOP (%)	100	70	65	70,90	70,90	●	Bagian Organisasi Setda
4	Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan unit pengaduan publik (%)	100	70	60	70,90	70,90	●	Bagian Organisasi Setda
5	Rata-rata nilai integritas Pelayanan Publik OPD	B	B	C+	B	B	●	Bagian Organisasi Setda
6	Persentase kecamatan yang menerapkan PATEN (%)	100	50	33	100	100	●	Bagian Organisasi Setda

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai tahun 2016 dari sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 4 target indikator akan tercapai. Guna pencapaian target akhir RPJMD, maka perlu dilakukan upaya percepatan dan konsistensi pencapaian kinerja khususnya pada indikator yang akan tercapai.

E. Fungsi Lain

1. Kerjasama Daerah

Kinerja penyelenggaraan urusan kerjasama daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel E.1.

Tabel E.1
Capaian Kinerja Urusan Kerjasama Daerah

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir Rpjmd	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Program Kerjasama Pembangunan							

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir Rpjmd	OPD Penanggungjawab
				2015	2016			
1	Persentase MOU yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	70,00	57,14	57,14	DTD	DTD	▼	Bagian Pemerintahan

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kerjasama Daerah sampai tahun 2016 belum mencapai target persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo sehingga memerlukan upaya keras bagi pencapaian target.

2. Penyelenggaraan Urusan Pengawasan

Kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel E.2.

Tabel E.2
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi i Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggung gjawab	
				2015	2016				
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK(%)	100	75,02	71,45	70,15	70,15		Inspektorat
2	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								
	1	Level APIP	2	1	1	1,3	1,3		Inspektorat
3	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat								
	1	Persentase kasus yang dilaporkan melalui whistle blowing system(%)	30	0	DTD	BELUM ADA	BELUM ADA		Inspektorat
3	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan								
	1	Persentase OPD yang menerapkan SPIP(%)	100	0	0	0,00	0,00		Inspektorat

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▷ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dari 3 indikator sasaran pada urusan kesehatan terdapat 1 indikator telah mencapai target dan 2 indikator akan tercapai yaitu persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK dan level APIP dan satu indikator yang memerlukan upaya keras yaitu persentase kasus yang dilaporkan melalui *whistle blowing system*. Level APIP menunjukkan kapasitas dalam jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan pencegahan korupsi. Nilai 1,3 pada tahun 2016 sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih memerlukan upaya keras agar mencapai target RPJMD.

3. Penyelenggaraan Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Kinerja penyelenggaraan urusan hukum dan penataan peraturan perundang-undangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dengan capaian pada Tabel E.3.

Tabel E.3
Capaian Kinerja Urusan Hukum
dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Urusan dan Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD S/D 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab
					2015	2016			
1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
	1	Rasio realisasi Propemperda	10/25	6/25	5/25	DTD	DTD		Bagian Hukum Setda
	2	Persentase Raperda Yang disetujui DPRD(%)	100	100	100	100	100		Bagian Hukum Setda
	3	Rasio Perda yang dibatalkan terhadap raperda dan raperbup yang ditetapkan menjadi Perda dan Perbup	0,1	0,1	DTD	0	0		Bagian Hukum Setda
	4	Persentase perbup yang ditetapkan terhadap jumlah perbub amanat Perda(%)	50	10	10	60	60		Bagian Hukum Setda

3	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah							
1	Persentase Raperda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD(%)	4	2	2	4	4	●	Sekretariat DPRD
2	Persentase keputusan/peraturan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD(%)	30	25	25	94,73	94,73	●	Sekretariat DPRD
2	Persentase keputusan/peraturan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD(%)	30	25	25	94,73	94,73	●	Sekretariat DPRD

Keterangan :



: Telah Tercapai ;



: Akan Tercapai;



: Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel tersebut di atas, 6 indikator sasaran pada urusan hukum dan penataan peraturan perundang-undangan terdapat 5 indikator telah mencapai target pada tahun 2016 dan 1 indikator yang memerlukan upaya keras. Hal ini merupakan tantangan terhadap pemerintah Kabupaten Wonosobo agar capaian target yang telah terpenuhi tetap konsisten.